



Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa Inklusif di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem (Studi Kasus Masyarakat Disabilitas).

1st Anak Agung Putri Kania Pratiwi^a, 2nd I Ketut Winaya^a, 3rd Ni Wayan Supriliyani^a

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Indonesia

Correspondent: gungkania04@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Penelitian ini diukur dengan teori pengukuran kinerja organisasi publik menurut Agus Dwiyanto (2006). Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif cukup baik, yaitu pada indikator produktivitas, kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif belum berjalan dengan optimal karena perlu adanya pengoptimalan terhadap jumlah SDM dan anggaran. Pada Indikator kualitas layanan, kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif sudah berjalan dengan baik. Pada indikator responsivitas, kinerja Pemerintah Desa Pempatan belum optimal karena perlu adanya pengoptimalan pada program pelatihan yang masih kurang. Pada indikator tanggung jawab, kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif sudah berjalan dengan optimal. Kemudian pada indikator akuntabilitas, kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif sudah berjalan dengan optimal.

Kata kunci: Kinerja, Desa Inklusif, Pempatan, Pembangunan Inklusif, Masyarakat Disabilitas

Abstract

This research uses qualitative research with a descriptive approach. The data sources used are primary and secondary data. The technique for determining informants in this research uses purposive sampling. This research is measured by the performance measurement theory of public organizations according to Agus Dwiyanto (2006). The results of the research show that the performance of the Pempatan Village Government in inclusive village development is quite good, namely in terms of productivity indicators, the performance of the Pempatan Village Government in inclusive village development has not run optimally because there is a need to optimize the number of human resources and budget. In terms of service quality indicators, the performance of the Pempatan Village Government in inclusive village development has gone well. On the responsiveness indicator, the performance of the Pempatan Village Government is not yet optimal because there is a need to optimize the training program which is still lacking. On the responsibility indicator, the performance of the Pempatan Village Government in inclusive village development has been running optimally. Then in terms of accountability indicators, the performance of the Pempatan Village Government in inclusive village development has been running optimally.

Keywords: Performance, Pempatan Inclusive Village, Inclusive Development, Disability Society

1. Pendahuluan

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat, yang dimana sejalan dengan tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan merupakan proses multi dimensi yang mencakup perubahan penting seperti struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga tradisional, tetapi juga tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan (Cohen, 1992).

Kesenjangan sosial yaitu suatu keadaan di mana terjadi kesenjangan, ketimpangan, ataupun ketidaksetaraan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang terjadi dalam suatu masyarakat, yang dimana berarti kesenjangan sosial berarti tidak seimbang atau terjadi jarak di tengah masyarakat, maka dari itu diperlukannya pembangunan inklusif. Pembangunan inklusif ditujukan agar pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya kesenjangan sosial. Pembangunan ini bertujuan agar semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, tak terkecuali kelompok masyarakat

disabilitas sesuai dengan tujuan dari inklusif sosial yang dimana bertujuan agar individu atau kelompok tertentu dapat berpartisipasi dalam kehidupan social (Simarmata, 2017).

Penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Dimana kelompok masyarakat disabilitas ini sudah seharusnya diikuti sertakan dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi sampai pemanfaatan hasil pembangunan sebagaimana masyarakat lainnya (Fairuza, 2017).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dengan menggunakan pendekatan sosial dan Hak Asasi Manusia. Pendekatan ini memandang bahwa masyarakat disabilitas merupakan masyarakat yang memiliki hak asasi yang sama dengan masyarakat lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia tidak lagi memandang masyarakat disabilitas sebagai individu yang tidak mampu atau kurang mampu, yang dimana sesuai dengan tujuan dari desa inklusif (Manan, 2006). Dalam melaksanakan pembangunan, dibutuhkan juga pengoptimalan kinerja pemerintah untuk mencapai tujuan dari Pembangunan (Amansyah, 2021).

Kinerja merupakan gambaran dari kemampuan seseorang dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan menetapkan suatu tujuan tertentu (Sinambela, 2016). Keberhasilan suatu organisasi berkaitan dengan maksimal atau tidaknya kinerja yang dilaksanakan oleh anggota organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Kinerja juga dapat diartikan sebagai hasil dari terlibatnya usaha, kemampuan serta pemahaman tugas. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja seseorang yaitu sifat agresif, kreatif, percaya diri, serta sifat yang dapat mengendalikan diri sendiri (Siagian 1988). Dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, seluruh instansi pemerintahan tak terkecuali Pemerintah Desa Pempatan yang tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya.

Pembangunan inklusif sudah mulai diterapkan di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Karangasem, yang dimana merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Pemerintah Kabupaten Karangasem sudah melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dalam Peraturan Daerah tersebut sudah dijelaskan bahwa masyarakat disabilitas mempunyai hak, peran, dan kedudukan yang sama dengan masyarakat lainnya dan wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, yang dimana sesuai dengan tujuan dari desa inklusif (Ndorang, 2019).

Desa Pempatan merupakan salah satu desa di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Desa Pempatan merupakan salah satu desa yang menjadi fokus pembangunan inklusif di Kabupaten Karangasem, dan sudah ditetapkan menjadi desa inklusif. Berdasarkan data dari Perbekel Desa Pempatan sebagai berikut.

Tabel 1 Data Disabilitas

No	Banjar Dinas	Disabilitas
1.	Banjar Puregai	13
2.	Banjar Alasngandang	6
3.	Banjar Geliang	4
4.	Banjar Keladian	17
5.	Banjar Kubakal	16
6.	Banjar Pempatan	3
7.	Banjar Pemuteran	9
8.	Banjar Pule	7
9.	Banjar Putung	3
10.	Banjar Teges	4
11.	Banjar Waringin	4
Jumlah Total		86

Sumber: Perbekel Desa Pempatan

Berdasarkan tabel data di atas, Desa Pempatan memiliki masyarakat penyandang disabilitas terbilang cukup banyak. Sebelum Desa Pempatan ditetapkan sebagai desa inklusif pada tahun 2020, masyarakat penyandang disabilitas tidak diikuti sertakan dalam kegiatan atau musyawarah di desa. Akan tetapi sejak ditetapkan sebagai desa inklusif masyarakat disabilitas mulai diikuti sertakan pada kegiatan yang dilaksanakan di desa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di Desa Pempatan terkait kinerja pemerintah desa dalam pembangunan inklusif masih mengalami masalah. Masalah *pertama* yaitu tidak adanya penerjemah khusus dari pemerintah desa untuk masyarakat tuna rungu atau wicara, dimana hal ini menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi saat adanya kegiatan. Masalah *kedua* yaitu kurangnya pelatihan yang diberikan kepada masyarakat penyandang disabilitas. Sampai saat ini pelatihan untuk masyarakat penyandang disabilitas hanya dilaksanakan setahun sekali yaitu pelatihan pembuatan tusuk sate. Seharusnya pemerintah bisa melaksanakan pelatihan yang beragam tiap tahunnya agar masyarakat mempunyai keterampilan yang beragam. Selain itu beberapa masyarakat disabilitas di Desa Pempatan juga memiliki potensi. Adapun anggaran untuk kegiatan penyandang disabilitas di Desa Pempatan yaitu Rp.4.950.000,00/tahun.

Masalah *ketiga* yaitu sarana operasional yang masih kurang memadai. Pemerintah seharusnya bisa lebih memfasilitasi masyarakat dengan memberikan sarana yang cukup. Berdasarkan permasalahan ataupun kendala yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan teori pengukuran kinerja organisasi dari Dwiyanto dalam Pasolong (2017). Kinerja dapat diartikan sebagai hasil dari sebuah usaha, kemampuan serta pemahaman tugas. Keberhasilan suatu organisasi berkaitan dengan maksimal atau tidaknya kinerja yang dilaksanakan oleh anggota organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Sesuai dengan pengertian kinerja di atas, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja yang bertujuan untuk mengetahui dan mendalami permasalahan-permasalahan yang terdapat pada Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan inklusif. Selain itu melalui pengukuran kinerja diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kinerja dari Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif (Maftuhin, 2017).

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui secara mendalam mengenai bagaimana kinerja pemerintah desa dalam pembangunan desa inklusif serta untuk mendapatkan hasil lapangan yang bisa dimanfaatkan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2010) untuk mengkaji kinerja pemerintah desa dalam pembangunan inklusif di Desa Pempatan, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Tujuan metode ini adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menanggapi masalah yang diteliti, fokus pada fenomena sosial, perilaku, dan keyakinan individu atau kelompok.

Sumber data dibagi menjadi primer dan sekunder (Miles, 1992). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, seperti Perbekel Desa, Dinas Sosial, Kepala Dusun, dan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal, buku, dan dokumen resmi.

Unit analisis penelitian ini adalah kinerja pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan inklusif, serta masyarakat penyandang disabilitas sebagai sasaran pembangunan.

Teknik penentuan informan menggunakan Purposive Sampling (Soekanto, 1990), dengan informan dari Dinas Sosial, Perbekel Desa, perangkat desa, masyarakat disabilitas, dan masyarakat Desa Pempatan.

Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap kinerja pemerintah desa dalam pembangunan inklusif di Desa Pempatan. Wawancara dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dengan informan yang telah ditentukan. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dari berbagai sumber tertulis.

Teknik analisis data kualitatif melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk mempertajam data, penyajian data untuk menyusun informasi secara sistematis, dan penarikan kesimpulan untuk memvalidasi kesimpulan penelitian.

Teknik penyajian data menggunakan media tulisan dan tabel, dengan data disajikan dalam bentuk kalimat narasi dan tabel yang teratur.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Temuan dan Analisa

Tabel 2 Rangkuman Hasil Temuan di Lapangan

No	Indikator	Tolak Ukur	Dimensi	Hasil Temuan
1.	Produktivitas	Input	SDM	1. Kualitas SDM Latar belakang pendidikan SDM Desa Pempatan dalam pemberdayaan masyarakat itu pegawainya ada 30 orang dengan latar yang berbeda-beda. 11 orang yang pendidikan terakhirnya yakni S1, 1 orang D1, 17 orang SMA dan 1 orang yang pendidikan terakhirnya SMP. 2. Kuantitas SDM Jumlah pegawai Desa Pempatan yakni sebanyak 30 orang. Jumlah ini terbilang terbatas bagi masyarakat disabilitas di Desa Pempatan yang cukup banyak. Selain itu tidak adanya penerjemah khusus bagi masyarakat disabilitas bisu tuli. Anggaran Desa Pempatan dalam pemberdayaan masyarakat kepada penyandang disabilitas berasal dari dana desa. Anggaran yang diberikan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu sebanyak Rp. 7.335.000.
			Anggaran	-Sarana Operasional Sarana Operasional yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Pempatan yaitu kursi 5 buah roda dan 5 buah tongkat. Untuk sarana masih dikatakan kurang karena jumlah alat tidak sebanding dengan jumlah masyarakat disabilitas yang membutuhkan.
			Sarana dan Prasarana	-Prasarana Operasional Prasarana Desa Pempatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan hak masyarakat penyandang disabilitas yaitu hanya menggunakan kantor desa saja. Untuk prasarana ini sudah dapat dikatakan memadai, karena dapat menampung saat dilaksanakannya pelatihan.
			Sasaran Kegiatan	1. Adanya Kebijakan Upaya pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan hak masyarakat disabilitas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Kemudian ada Peraturan Daerah Provinsi Bali No 9 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Selain itu ada juga Peraturan Desa Pempatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas dan Keputusan Perbekel Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kelompok Penyandang Disabilitas. Kelima peraturan ini sangat berperan penting dalam menunjang kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan hak masyarakat penyandang disabilitas. 2. Adanya Pelayanan Desa Pempatan memberikan pelayanan berupa pelatihan pembuatan tusuk sate dan pelatihan memasak akan tetapi hanya dilaksanakan satu tahun sekali.
2.	Kualitas Layanan	Output Kepuasan Masyarakat	Kriteria Layanan Publik	1. Alur Untuk alur masyarakat penyandang disabilitas dalam

			yang Baik	memperoleh layanan yaitu seperti jika ada keperluan administrasi maka pemerintah desa yang akan langsung mencari ke rumah masyarakat penyandang disabilitas, lalu jika ada bantuan sosial maka akan diantarkan juga ke rumah masyarakat. Selain itu untuk masyarakat yang kesulitan untuk transportasi pada saat pelatihan dilaksanakan maka akan dijemput oleh pegawai pemerintah Desa Pempatan secara langsung. Dimana tidak memberatkan masyarakat dan mempermudah masyarakat disabilitas dalam memperoleh pelayanan.
3.	Responsivitas	Kemampuan Mewujudkan Visi dan Misi Organisasi	Mengenali Kebutuhan Masyarakat akan Layanan	Pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dengan pelatihan-pelatihan merupakan bentuk penunjukan visi misi dari Pemerintah Desa Pempatan sendiri yaitu meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi Gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang dimana pelatihan pembuatan tusuk sate dan pelatihan memasak merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat di Desa Pempatan.
4.	Responsibilitas		Eksplisit	Adanya Pengawasan Responibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar yang bersifat eksplisit dari kegiatan Desa Pempatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan hak masyarakat penyandang disabilitas. Pengawasan lapangan dilakukan oleh Perbekel Desa Pempatan.
			Adanya Pelaporan	Akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pempatan berupa laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dirangkum secara rutin tiap tahunnya dan dilaporkan kepada Bupati Karangasem.
5.	Akuntabilitas	Pertanggung jawaban	Transparansi	Bentuk pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa Pempatan melalui transparansi publik dilakukan dengan melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan dan menyampaikan data-data pada saat RAT (Rapat Akhir Tahun) Desa dilaksanakan yang dimana melibatkan perwakilan masyarakat termasuk perwakilan masyarakat disabilitas.
			Manfaat	Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terkait pembangunan desa inklusif oleh Pemerintah Desa Pempatan yaitu penguatan masyarakat dalam bentuk pelatihan keterampilan serta kesamaan hak dengan masyarakat lainnya.

Analisis Hasil Temuan

Berdasarkan hasil yang peneliti temukan di lapangan, mengenai kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif khususnya masyarakat disabilitas oleh penulis dikaitkan dengan indikator pengukuran kinerja organisasi menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2017). Adapun indikator-indikator tersebut terdiri atas 5 indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responabilitas, dan akuntabilitas yang dimana berpengaruh pada keberhasilan ataupun kegagalan kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif khususnya terkait masyarakat disabilitas.

Produktivitas

Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2017), produktivitas dimaknai sebagai perbandingan antara input (masukan) dengan output (luaran) yang memaparkan secara jelas tentang capaian target yang diperoleh oleh organisasi publik

melalui produktivitas yang maksimal. Perbandingan ini diartikan apakah pelaksanaan input yang dilakukan oleh organisasi publik sesuai dengan hasil output yang maksimal. Adapun keterkaitan indikator produktivitas dengan hasil temuan di Desa Pempatan terkait kinerja dalam pembangunan desa inklusif yang berfokus pada masyarakat disabilitas, sebagai berikut:

a. Input

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sesuatu yang penting dalam suatu organisasi sektor publik untuk menjalankan tugasnya sehingga tujuan organisasi tercapai. Keberhasilan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai input dapat diukur dari sejauh mana kualitas SDM dan kuantitas SDM dalam organisasi sektor publik. Kualitas SDM adalah tingkatan kemampuan daya atau tenaga kerja dalam suatu organisasi sektor publik. Kualitas SDM adalah tingkatan kemampuan daya atau tenaga kerja dalam suatu organisasi dan dapat diukur dari tinggi rendahnya latar belakang Pendidikan (Rosidi, 2013). Kemudian kuantitas SDM merupakan jumlah anggota dalam organisasi, dan pengukurannya melalui sejauh mana dari jumlah anggota dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di organisasi terkait. Pemberdayaan masyarakat kepada penyandang disabilitas didukung oleh kualitas dan kuantitas dari Pegawai Pemerintah Desa Pempatan (Fuadi, 2020).

Kualitas SDM tercermin dari latar belakang pendidikan pegawai Pemerintah Desa Pempatan. Pemerintah Desa Pempatan memiliki 30 orang pegawai dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. 11 orang yang pendidikan terakhirnya yakni S1, 1 orang D1, 17 orang SMA dan 1 orang smp, yang dimana jumlah ini terbilang cukup terbatas. Selain itu tidak adanya penerjemah khusus bagi masyarakat disabilitas bisu tuli. Berdasarkan kualitas dan kuantitas pegawai Pemerintah Desa Pempatan dapat disimpulkan bahwa SDM Pemerintah Desa Pempatan masih belum memadai. Hal ini terlihat dari jumlah pegawai yang masih kurang yang dimana dapat menghamat upaya pemberdayaan masyarakat kepada penyandang disabilitas di Desa Pempatan.

Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan dimensi penilaian input dalam suatu organisasi atau lembaga. Secara umum, sarana dan prasarana merujuk pada seperangkat hal yang digunakan untuk membantu proses kegiatan sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Penilaian terhadap sarana dan prasarana dapat dilihat dari sejauh mana anggaran dan sarana prasarana operasional mampu mendukung kegiatan organisasi publik. Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan termasuk hal penting dalam mendukung segala kegiatan yang telah direncanakan oleh organisasi publik. Sarana operasional adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana operasional adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses seperti bangunan (Prasetyantoko, 2012).

Adapun sarana operasional yang dimiliki oleh Desa Pempatan yaitu 5 buah kursi roda dan 5 buah tongkat. Selain itu untuk prasarana nya yaitu memakai kantor desa untuk pelaksanaan pelatihan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Pempatan masih belum cukup memadai. Hal ini terlihat dari sarana yang masih kurang untuk masyarakat disabilitas

Anggaran

Anggaran adalah sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka yang berperan penting dalam mendukung segala kegiatan yang telah direncanakan oleh organisasi public (Suharto, 2005). Dalam hal ini, anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa Pempatan untuk keperluan masyarakat disabilitas bersumber dari dana desa. Mengacu pada upaya pemberdayaan masyarakat disabilitas Desa Pempatan memiliki anggaran sebanyak Rp. 7.335.000 yang bersumber dari dana desa dan yang digunakan untuk pelaksanaan penguatan pelatihan.

b. Output

Output adalah hasil yang didapatkan langsung setelah adanya proses kegiatan. Tolak ukur penilaian suatu output organisasi dapat dilihat dari sasaran kegiatan-kegiatannya. Sasaran kegiatan merupakan target spesifik dan dapat ditindaklanjuti yang perlu dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan tindakan atau kegiatan yang terlibat dalam mencapai tujuan yang dikehendaki (Swastika, 2022).

Output merupakan jumlah hasil yang dicapai suatu organisasi publik dalam jangka waktu singkat. Output

organisasi publik dapat diukur dari sejauh mana organisasi didukung oleh adanya peraturan atau kebijakan dan pelayanan. Upaya pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan hak masyarakat disabilitas didukung oleh adanya peraturan atau kebijakan, diantara yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dengan menggunakan pendekatan sosial dan Hak Asasi Manusia. Kemudian ada Peraturan Daerah Provinsi Bali No 9 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Di Desa Pempatan sendiri terdapat Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas dan ada Keputusan Perbekel Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kelompok Penyandang Disabilitas. Adanya peraturan dan kebijakan ini dapat dikatakan sebagai kuantitas dari suatu output organisasi publik. Kelima peraturan ini sangat berperan penting dalam menunjang kegiatan kami terkait pemberdayaan masyarakat disabilitas dan pemenuhan hak masyarakat penyandang disabilitas di Desa Pempatan.

Output juga dapat diukur dari adanya layanan yang diberikan Pemerintah Desa Pempatan dalam pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan pembuatan tusuk sate dan pelatihan memasak, akan tetapi hanya dilaksanakan satu tahun sekali. Berdasarkan hasil temuan dijelaskan bahwa adanya peraturan dan pelayanan untuk mendukung Pemerintah Desa Pempatan dalam pemberdayaan masyarakat kepada penyandang disabilitas di Desa Pempatan sudah dapat dikatakan cukup memadai, hal ini terlihat dari sudah adanya peraturan atau kebijakan yang mengatur pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Akan tetapi pelatihan yang diberikan masih terbilang kurang bervariasi.

Kualitas Layanan

Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2017), indikator kualitas layanan ini berkaitan dengan baik tidaknya pelayanan yang diberikan oleh organisasi kepada masyarakat yang menjadi sasaran program kerja dalam suatu organisasi. Indikator kualitas layanan digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dikarenakan informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Kualitas layanan relative tinggi, maka dapat menjadi suatu ukuran kinerja organisasi publik. Kualitas layanan berperan sebagai penjelas kinerja organisasi dan birokrasi publik, yang dimaksud penjelas tersebut dapat melalui adanya pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang baik. Indikator kualitas layanan dapat diukur dari sejauh mana birokrasi publik telah memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Kepuasan masyarakat adalah suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat terpenuhi akan layanan yang disediakan organisasi publik. Tolak ukur kepuasan masyarakat dapat dilihat dari kriteria layanan publik yang baik. Penilaian terhadap kriteria layanan publik yang baik dapat dilihat dari alur pelayanannya. Suatu alur atau persyaratan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi untuk melaksanakan sesuatu (Hastuti, 2020).

Upaya pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan hak masyarakat penyandang disabilitas di Desa Pempatan yang dimana pemerintah Desa Pempatan memberikan layanan administrasi dengan langsung menguji rumah masyarakat disabilitas yang bersangkutan, lalu jika terdapat bantuan sosial maka akan diantarkan langsung ke rumah yang bersangkutan. Kemudian saat pelatihan dilaksanakan masyarakat disabilitas berhalangan hadir maka akan dijemput oleh pegawai Desa Pempatan untuk mempermudah dan tidak mempersulit masyarakat disabilitas.

Responsivitas

Responsivitas adalah salah satu indikator yang dapat mengukur kinerja organisasi sektor publik. Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2017), indikator responsivitas menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam mewujudkan visi misi lembaga maupun organisasinya. Kemampuan mewujudkan visi dan misi organisasi merupakan wujud dan bagaimana cara organisasi memenuhi kebutuhan agar tercapainya tujuan organisasi. Kemampuan dalam mewujudkan visi dan misi dilihat dari cara organisasi mengenali kebutuhan masyarakat akan layanan yang diberikan sesuai dengan visi dan misi dari organisasi.

Pemerintah Desa Pempatan dalam mewujudkan visi dan misinya membuat program pemberdayaan masyarakat kepada penyandang disabilitas. Dengan adanya pemberian pelatihan-pelatihan untuk penguatan masyarakat disabilitas menjadi lebih mandiri yang sesuai dengan visi misi Desa Pempatan yaitu meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi Gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang (Sendow, 2007).

Berdasarkan hasil temuan lapangan terkait dengan kemampuan untuk mewujudkan visi misi organisasi maka dapat disimpulkan bahwa responsivitas Desa Pempatan dalam mewujudkan visi dan misinya sudah optimal, hal

ini dapat dilihat dari adanya layanan pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui pelatihan pembuatan tusuk sate dan pelatihan memasak.

Responsibilitas

Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2017), indikator responsibilitas merupakan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi dapat dilihat dari adanya pengawasan terhadap kegiatan organisasi. Pengawasan dalam proses memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan dilapangan dilakukan oleh Perbekel Desa Pempatan terhadap pembangunan desa inklusif. Berdasarkan hasil temuan dilapangan dengan adanya pengawasan dapat disimpulkan bahwa responsibilitas Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif yang berfokus kepada masyarakat disabilitas sudah cukup optimal.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2017). Indikator akuntabilitas adalah ukuran seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Akuntabilitas dijadikan sebagai indikator kinerja untuk melihat apakah kebijakan dan kegiatan birokrasi sudah berjalan dengan sesuai. Indikator akuntabilitas diukur sejauh mana organisasi melaksanakan pertanggung jawaban dan diukur dari sejauh mana organisasi melaksanakan pertanggung jawaban dan transparansi kepada publik. Pertanggung jawaban merupakan segala tanggung jawab yang disusun dalam bentuk fisik dapat berupa dokumen laporan. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh organisasi publik, melalui penyediaan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan (Torang, 2014).

Bentuk pertanggung jawaban dari Pemerintah Desa Pempatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan hak masyarakat penyandang disabilitas yaitu laporan kepada

1. Laporan Bupati Karangasem

Dalam hal ini, bentuk pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa Pempatan yaitu berupa laporan mengenai capaian kinerja serta penggunaan anggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Pempatan. Berkaitan dengan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara indicator akuntabilitas dengan bentuk pertanggungjawaban berupa laporan kepada Bupati Karangasem sudah dilakukan dengan optimal.

2. Transparansi Publik

Dalam hal ini bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Pempatan melalui transparansi publik dilakukan dengan melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pempatan dan data-data akan disampaikan pada saat RAT (Rapat Akhir Tahun) Desa yang dimana melibatkan perwakilan masyarakat termasuk masyarakat disabilitas.

Berkaitan dengan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara indicator akuntabilitas dengan bentuk pertanggungjawaban berupa transparansi publik dalam pembangunan desa inklusif sudah dilakukan dengan optimal.

3. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat

Dalam hal ini bentuk pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa Pempatan melalui manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terkait program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pempatan yaitu untuk membantu agar masyarakat disabilitas menjadi lebih mandiri.

Berkaitan dengan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara indicator akuntabilitas dengan bentuk pertanggungjawaban berupa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam pembangunan desa inklusif sudah dilakukan dengan optimal.

Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Desa Pempatan

Kinerja suatu organisasi maupun instansi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang berasal dari organisasi itu sendiri (faktor internal) maupun faktor yang berasal dari luar organisasi (faktor eksternal). Faktor-faktor tersebut dapat menghambat kinerja dari sisi negatifnya dan dapat meningkatkan kinerja organisasi dari sisi positifnya. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi

kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan hak masyarakat disabilitas (Andini, 2021).

Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam Pembangunan Desa Inklusif dengan Fokus Masyarakat Disabilitas.

Pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pempatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan hak masyarakat penyandang disabilitas dapat berjalan dengan baik jika didukung dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan efektivitas dan efisien kinerja suatu organisasi. Penjelasan mengenai faktor pendukung kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif dengan fokus masyarakat disabilitas, sebagai berikut:

1. Adanya alur pelayanan yang mudah

Adanya alur pelayanan yang mudah tentunya sangat mendukung keberhasilan kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif. Dimana alur pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit.

2. Adanya dasar hukum atau peraturan

Adanya dasar hukum merupakan faktor pendukung utama keberlangsungan kinerja dari instansi pemerintahan atau organisasi sektor public (Wulandari, 2019). Upaya pembangunan desa inklusif dengan fokus masyarakat disabilitas berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dengan menggunakan pendekatan sosial dan Hak Asasi Manusia. Kemudian ada Peraturan Daerah Provinsi Bali No 9 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Di Desa Pempatan sendiri terdapat Peraturan Nompr 3 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas dan ada Keputusan Perbekel Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kelompok Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut dijadikan acuan untuk pembangunan desa inklusif dengan fokus masyarakat disabilitas di Desa Pempatan. Mengacu pada peraturan yang ada tentu diharapkan kinerja dari organisasi publik yakni Pemerintah Desa Pempatan untuk tampil dengan profesional dan tanggap terhadap pembangunan desa inklusif yang dimana mau merangkul seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat disabilitas.

3. Adanya pengawasan

Pengawasan adalah proses memastikan bahwa segala aktivitas yang telaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pembangunan desa inklusif di Desa Pempatan juga mendapatkan pengawasan agar sesuai dengan prosedur yang ada. Pengawasan di lapangan dilakukan oleh Perbekel Desa Pempatan

4. Adanya laporan kepada pemerintah daerah

Adanya laporan pertanggungjawaban kepada Bupati menjadi faktor pendukung pelaksanaan Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif. Bentuk pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa Pempatan berupa laporan capaian kerja serta penggunaan anggaran.

5. Adanya transparansi publik

Adanya pertannggjawaban oleh Pemerintah Desa Pempatan kepada masyarakat melalui transparansi menjadi faktor pendukung pelaksanaan Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif. Bentuk pertanggungjawaban berupa dokumentasi kegiatan dan data-data yang akan dijelaskan saat RAT Desa yang dimana melibatkan perwakilan masyarakat tak terkecuali masyarakat disabilitas.

6. Adanya manfaat

Adanya pertanggungjawaban melalui manfaat yang dirasakan oleh masyarakat menjadi faktor pendukung pelaksanaan Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif dalam pembangunan desa inklusif. Bentuk pertanggungjawaban ini melalui manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terkait program-program yang diberikan oleh pemerintah desa yaitu untuk membantu agar masyarakat menjadi lebih mandiri dan menambah keterampilan.

Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam Pembangunan Desa Inklusif dengan Fokus Masyarakat Disabilitas.

Pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif dengan fokus masyarakat disabilitas akan berjalan kurang optimal jika terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja yang efektif dan efisien. Penjelasan mengenai faktor penghambat kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif dengan fokus masyarakat disabilitas, sebagai berikut:

1. Kuantitas SDM kurang memadai

Kuantitas SDM tertuju pada jumlah pegawai di Desa Pempatan yaitu sebanyak 30 orang pegawai, dimana terbatasnya jumlah pegawai ini dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan desa inklusif. Hambatan yang muncul akibat kurangnya jumlah pegawai ini adalah tidak adanya penerjemah khusus untuk masyarakat disabilitas bisu tuli. Selain itu tidak ada yang berpengalaman dalam menangani masyarakat disabilitas.

2. Terbatasnya anggaran

Terbatasnya anggaran Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif yang berfokus kepada penyandang disabilitas berasal dari dana desa. Namun anggaran tersebut dapat dikatakan terbatas, hal ini dapat dilihat dari sarana untuk masyarakat di Desa Pempatan yang cukup terbatas karena keterbatasan anggaran. Selain itu pelatihan untuk penguatan masyarakat disabilitas yang hanya bisa dilaksanakan satu tahun sekali juga dikarenakan keterbatasan pada anggaran. Dalam penyusunan anggaran juga tidak semua usulan dapat terealisasi sesuai dengan jumlah dan program yang diusulkan. Akan tetapi, Pemerintah Desa Pempatan berusaha memaksimalkan anggaran yang ada agar program yang sudah direncanakan dapat berjalan walaupun dengan dana yang terbatas. Terbatasnya anggaran tentu menghambat kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif yang berfokus kepada masyarakat disabilitas secara maksimal.

3. Sarana operasional kurang memadai

Sarana operasional sangat mendukung kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif yang berfokus kepada penyandang disabilitas, yang dimana Pemerintah Desa Pempatan hanya memiliki kursi roda 5 buah dan tongkat 5 buah. Sarana operasional dikatakan cukup kurang memadai yang dimana dapat dilihat dari jumlahnya yang cukup terbatas untuk digunakan masyarakat disabilitas.

Rekomendasi Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa Pempatan

Kinerja dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Bagi organisasi publik kinerja dianggap sebagai acuan apakah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil temuan dan analisa yang telah dibuat oleh penulis maka dihasilkan rekomendasi yang dapat dipergunakan sebagai upaya dalam peningkatan kinerja Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif yang berfokus pada masyarakat penyandang disabilitas. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan, sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia pada Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif yang berfokus kepada masyarakat disabilitas perlu diperhatikan. Kecakapan sumber daya manusia tentu didukung melalui kuantitas dan kualitas dari sumber daya yang melaksanakan tugas dalam suatu organisasi publik. Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif yang berfokus kepada masyarakat disabilitas memerlukan kecakapan sumber daya manusia dalam hal ini perlu adanya perhatian terhadap kuantitas dan kualitas dari pegawai Pemerintah Desa Pempatan. Upaya meningkatkan kuantitas sumber daya manusia maka perlu adanya penambahan jumlah petugas, dimana penambahan ini membantu mengefektifkan tugas dari pegawai Pemerintah Desa Pempatan sehingga mampu melaksanakan pembangunan desa inklusif yang berfokus kepada masyarakat disabilitas secara maksimal dan juga untuk melengkapi posisi-posisi yang dibutuhkan oleh masyarakat disabilitas.
2. Perlu adanya *refocusing* anggaran. *Refocusing* anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran. Pelatihan penguatan masyarakat disabilitas perlu di *refocusing* anggarannya dikarenakan hanya dilaksanakan setahun sekali saja. Selain itu pemerintah bisa mencari ide pelatihan yang lebih bervariasi lagi yang cukup sesuai dengan anggaran yang ada.
3. Perlu adanya pengukuran output berupa *assessment* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pempatan.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pempatan melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam pembangunan desa inklusif yang berfokus kepada penyandang disabilitas, tetapi perlu ada peningkatan dalam indikator produktivitas dan akuntabilitas. Hasil ini diperoleh dengan menganalisis 5 indikator menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2017), yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik. Berikut ini kesimpulan dari penelitian ini:

1. Pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa Pempatan dari segi indikator produktivitas dalam pembangunan desa inklusif yang berfokus kepada masyarakat disabilitas dapat dikatakan belum optimal. Hal ini terlihat dari kurang optimalnya input seperti dari kuantitas SDM dan sarana prasarana.
2. Terkait indikator kualitas layanan, Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif yang berfokus kepada masyarakat disabilitas dapat dikatakan sudah optimal. Hal ini terlihat dari adanya pelatihan untuk penguatan masyarakat disabilitas. Selain itu jika ada keperluan dalam administrasi maka pemerintah akan membantu masyarakat disabilitas dengan langsung mendatangi rumah bersangkutan. Kemudian saat pelatihan dilaksanakan dan masyarakat kesulitan dalam transportasi maka akan dijemput oleh pegawai yang ada. Kualitas layanan ini dapat dikatakan optimal karena tidak mempersulit masyarakat disabilitas.
3. Responsivitas Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif yang berfokus kepada masyarakat disabilitas dapat dikatakan sudah optimal. Hal ini terlihat dari kemampuan Pemerintah Desa Pempatan dalam menunjukan visi misinya dengan adanya pemberdayaan masyarakat disabilitas dengan program pelatihan memasak dan pelatihan tusuk sate.
4. Responsibilitas Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif yang berfokus kepada masyarakat disabilitas dapat dikatakan sudah optimal, hal ini terlihat dari adanya pengawasan lapangan oleh Perbekel Desa Pempatan.
5. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif yang berfokus kepada masyarakat disabilitas dapat dikatakan cukup optimal. Hal ini terlihat dari adanya bentuk pertanggung jawaban dari Pemerintah Desa Pempatan dalam pembangunan desa inklusif yang berfokus kepada masyarakat disabilitas berupa laporan kepada bupati, transparansi publik, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amansyah, Denny. 2021. *Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru* <https://repository.uir.ac.id/16407/1/177310546.pdf> Diakses pada tanggal 10 Februari 2023
- Andini, N. P., Putri, D. P., Primadarma, N., & Isna, A. 2021. *Gendis: Change the Stigma of Pity into Independence of People with Disabilities*. In *The First International Conference on Political, Social and Humanities Sciences (ICPSH 2020)*(p.303). https://www.researchgate.net/profile/Titi-Darmi/publikation/349647577_ICPSH_2020_revisi_PROCEEDING/links/603a48f4a6fdcc37a8562eb8/ICPSH-2020-revisi-PROCEEDING.pdf#page=317. Diakses pada tanggal 22 November 2022.
- Cohen, Bruce. J. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fuadi. 2020. *Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja)* <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12845/1/Fuadi,%20150106076,%20FSH,%20IH,%20081263024887.pdf> . Diakses pada tanggal 5 Januari 2023.
- Hastuti, R. K. D., Pramana, R. P., & Sadaly, H. 2020. *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Smeru Research Institute.
- <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>. Diakses tanggal 17 Desember 2022.
- <https://penabulufoundation.org/pembangunan-inklusif/>. Diakses tanggal 17 Desember 2022

- Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan Kota inklusif: Asal-usul, Teori dan Indikator. *Jurnal Tata Loka*, 19(2), 93-103. https://www.jogloabang.com/sites/default/files/dokumen/mendefinisikan_kotainklusif_asal-usul_teor_i.pdf. Diakses pada tanggal 22 November 2022.
- Manan, Bagir dkk. 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Alumni.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode – metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Ndorang, Fransiskus Xaverius. 2019. *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas di Desa Noebalki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang*. <http://repository.unwira.ac.id/id/eprint/10295>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2023.
- Negara, Menteri, & Negara Pendayaagunaan Aparatur. (2008). *Pengukuran Dan Analisis Kinerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Pasolong, Harbani. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung
- Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Desa Pempatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas
- Prasetyantoko, A., Budiantoro, S., Bahagijo, S. 2012. *Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Rosidi, Abidarin dan Anggraeni, R. Fajriani. 2013. *Reinventing Government: Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Sendow. (2007). *Pengukuran Kinerja Karyawan*. Jakarta: Gunung Agung
- Sinambela (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali press. Spradley dan Faisal. 1990. *Format – Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*. Bandung: Pteprevika Aditam.
- Swastika, Ketut Agus. 2022. *Collaborative Governance dalam Pembangunan Desa Inklusif di Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng*. Universitas Udayana
- Torang, Syamsir. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Wulandari, Febriani. 2019. *Kolaborasi Organisasi Terhadap Perlindungan dan Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone)* Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5913-Full Text.pdf>. Diakses pada tanggal 28 November 2022.